

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha. Budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja (Ambara, 2014).

Menurut Satria (2004) sektor perikanan diduga dapat dijadikan *prime mover* dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan karena produksi perikanan tangkap dan budidaya negara ini masih relatif besar, permintaan terhadap produk perikanan masih terbuka, sektor perikanan memiliki *forward* dan *backward linkages* industri hulu dan hilir yang kuat, pertumbuhan industri yang merata sampai ke daerah dapat mengurangi masalah pengangguran karena sebagian besar kegiatan perikanan dan kelautan berada di daerah, serta sumberdaya perikanan bersifat *renewable resource* (sumberdaya alam yang dapat pulih).

Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama di Indonesia pada tahun 2010-2015 bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Produksi Perikanan Budidaya (ton) menurut Komoditas Utama
di Indonesia Tahun 2010-2015

No	Jenis Ikan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Rumput Laut	3.915.017	5.170.201	6.514.854	9.298.474	10.076.992	7.427.527
2	Udang	380.972	400.385	415.703	645.955	639.369	325.337
3	Kerapu	10.401	10.580	11.950	19.046	13.346	8.972
4	Kakap	5.738	5.236	6.198	6.735	5.447	3.245
5	Bandeng	421.757	467.449	518.939	627.333	631.125	414.569
6	Ikan Mas	282.695	332.206	374.366	412.703	434.653	227.613
7	Nila	464.191	567.078	695.063	914.778	999.695	592.366
8	Lele	242.811	337.577	441.217	543.773	679.379	396.539
9	Patin	147.888	229.267	347.000	410.883	418.002	256.287
10	Gurame	56.889	64.252	84.681	94.605	118.776	67.906
11	Lainnya	349.568	344.731	265.580	326.801	342.347	353.654
Jumlah		6.277.924	7.928.962	9.675.551	13.300.904	14.359.131	10.074.015

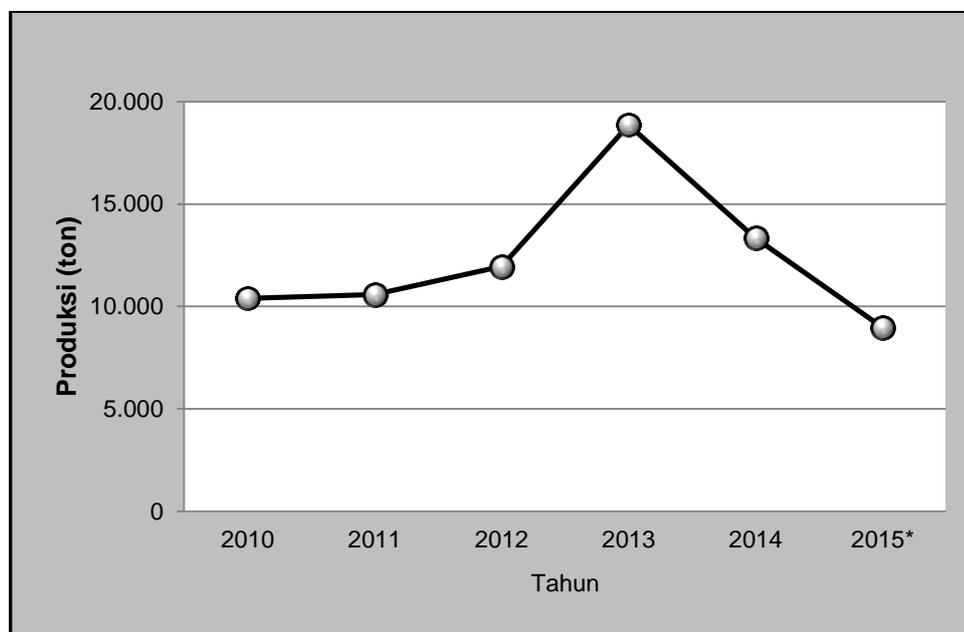
Keterangan: *) angka sementara.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama ini pertumbuhan dan perkembangan produksi budidaya laut lebih banyak didominasi oleh produksi rumput lautnya terutama jenis *Euchema cottonii*. Pada Tabel 1.1 disajikan data produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi adalah ikan kerapu. Perkembangan ikan kerapu selama beberapa tahun belakangan cukup pesat. Menurut Kelautan dan Perikanan dalam angka pada tahun 2014, produksi ikan kerapu mencapai 13.346 ton.

Menurut Sudja (2016), sejak akhir 2014 penjualan ikan kerapu budidaya di Indonesia mengalami hambatan dan merosot hingga tersisa 35% dari ekspor tahun 2012. Total ekspor dalam tujuh bulan terakhir hanya sebesar 400 ton, yang sebelumnya bisa mencapai 2.000 ton (per tujuh bulan). Karamba jaring apung

yang terisi tinggal 50% dan menunggu untuk dijual. Bak-bak *hatchery* pembenih ikan kerapu banyak yang kosong karena tidak menebar telur lagi dan *hatchery*-nya pun banyak yang dijual dengan harga murah karena mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 tahun 2015, bahwa jumlah kapal *buyer* yang mendapat ijin hanya lima buah saja. Dalam peraturan menteri dibatasi ukuran kapal maksimum 200 GT (*Gross Tonnage*). Sejak 12 tahun yang lalu *buyer* di Hongkong sudah mengganti kapal kayu tuanya dengan kapal besi berukuran 250 hingga 500 GT (*Gross Tonnage*), yang lebih efisien dan berdaya angkut lebih besar. Namun dengan keluarnya regulasi baru, maka jumlah kapal dan kapasitas kapal ini menyebabkan kemampuan armada *buyer* merosot dan tersisa sekitar 30% dari sebelum Peraturan Menteri KKP No. 15 tahun 2015 tersebut.



Gambar 1.1
Perkembangan Produksi Ikan Kerapu di Indonesia

Pada tahun 2010 produksi ikan kerapu mencapai 10.398 ton, kemudian meningkat sekitar 1,8% menjadi 10.580 ton pada tahun 2011. Produksi ikan kerapu terus meningkat sebesar 12,9% menjadi 11.950 ton pada tahun 2012, setelah itu terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 57,89% menjadi 18,864 ton, tetapi karena ada kebijakan pemerintah yang baru, maka populasi ikan kerapu pada tahun 2014 menurun drastis sebesar 29,3% menjadi 13.346 ton. Produksi ikan kerapu terus menurun hingga pada tahun 2015 sebesar 32,8% sebesar 8.972 ton ikan kerapu.

Hal lain yang membuat merosotnya ekspor ikan kerapu hidup adalah pembatasan pelabuhan tempat mengambil ikan hidup yang tinggal satu titik saja dari semula tidak ada pembatasan. Kapal *buyer* tidak bisa terisi penuh. Kawasan-kawasan yang menyediakan ikan kerapu hidup hanya Lampung, Belitung, Belawan, Natuna dan Bali saja. Sedangkan kawasan budidaya lain seperti Pangkalan Susu, Lhokseumawe, Sibolga, Painan, Air Bangis, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Karimun Jawa, Situbondo, Lombok, Sumbawa, Buton, Bontang, Tarakan, Ambon, Kendari, Luwuk Banggai, Tual, Dobo tidak ada kapal yang melayani (Sudja, 2016).

Menurut Agussalim (2013), pemerintah sudah mulai menggalakkan kembali budidaya ikan kerapu untuk membantu ketahanan pangan di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa ikan kerapu perlu dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Indonesia yakni: (1) kerapu merupakan komoditas perikanan yang memiliki peluang ekspor yang sangat menarik yang selama ini belum dimanfaatkan secara penuh, (2) pertumbuhan bisnis kerapu secara keseluruhan diharapkan akan membawa dampak peningkatan devisa, (3) modernisasi penangkapan dan

budidaya ikan kerapu akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut khususnya rusaknya terumbu karang.

Ikan kerapu merupakan komoditas penting di perairan Indonesia yang mempunyai prospek pemasaran yang cerah, baik dalam negeri maupun ekspor. Permintaan yang cukup tinggi terhadap komoditas kerapu telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi (penangkapan ikan) yang cukup tinggi atau berlebihan. Penangkapan yang berlebih dengan cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan peledak atau racun, dapat mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, usaha budidaya ikan kerapu dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut.

Pada tahun 1990-an, usaha budidaya ikan kerapu di dalam karamba jaring Apung (KJA) mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ikan kerapu. Budidaya ikan kerapu dalam KJA secara ekonomis telah memberikan dampak positif yang cukup penting bagi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan (WWF-Indonesia, 2015).

Pengembangan budidaya ikan kerapu (*grouper/trout*) dengan KJA menjadi alternatif untuk mengatasi kendala peningkatan produksi perikanan laut. Dalam pengembangan usaha ini yang paling penting adalah, bahwa harga jual produksi dari tahun ke tahun semakin baik dan sangat prospektif. Selain itu dengan teknologi budidaya karamba ini, produksi ikan dapat dipasarkan dalam keadaan hidup, dimana untuk pasaran ekspor ikan hidup nilainya lebih mahal hingga mencapai 10 kali lipat dari pada ekspor ikan *fresh* (Bank Indonesia).

Dalam usaha budidaya ikan kerapu, kondisi-kondisi faktor produksi dasar berupa sumberdaya alam, lokasi geografis, tenaga kerja terampil, di negara kita sangat mendukung. Potensi perairan yang luas dibandingkan dengan

perkembangan budidaya laut dinilai masih mempunyai peluang yang sangat besar, terlihat dari total pemanfaatan potensi lahan yang belum sepenuhnya meng-cover luas potensi lahan yang ada. Produksi ikan kerapu di Indonesia tersebar hampir di setiap provinsi di Indonesia. Produksi ikan kerapu untuk ukuran konsumsi, terbesar terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh dan Lampung. Produksi ikan kerapu dari budidaya pada dasarnya dapat lebih dikembangkan lagi. Hal ini jika melihat beberapa hal yang mendukung perkembangan budidaya kerapu tersebut baik faktor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Produksi ikan kerapu menurut provinsi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Dari Tabel 1.2 bisa dilihat bahwa Produksi ikan kerapu (ton) di Indonesia selama lima tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 produksi ikan kerapu mencapai 8.693 ton dan pada tahun 2010 produksi ikan kerapu meningkat menjadi sebesar 10.401 ton. Kemudian pada tahun 2011 meningkat kembali hingga mencapai 10.580 ton. Tahun 2012 produksi ikan kerapu terus meningkat sebesar 11.950 ton, hingga pada tahun 2013 produksi ikan kerapu di Indonesia melaju sangat pesat hingga mencapai 19.046 ton.

Dari sejumlah provinsi yang memiliki wilayah perairan di Indonesia, pada tahun 2013 sentral produksi kerapu masih didominasi oleh 10 (sepuluh) Provinsi penghasil utama, masing-masing Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian produksi sebesar 5.571 ton; Provinsi Sumatera Utara sebesar 4.418 ton; Provinsi Kepulauan Riau 1.940 ton; Provinsi Aceh 1.431 ton; Provinsi Maluku 1.203 ton; Provinsi Maluku Utara 720 ton; Provinsi Jawa Timur 601 ton; Provinsi Lampung 593; Provinsi NTB 427 ton dan Provinsi Sulawesi Tenggara 396 ton. Pada Tabel

1.3 terdapat perkembangan produksi ikan kerapu di Jawa Timur pada tahun 2009-2013.

Tabel 1.2
Produksi Ikan Kerapu (ton) Menurut Provinsi Tahun 2009-2013

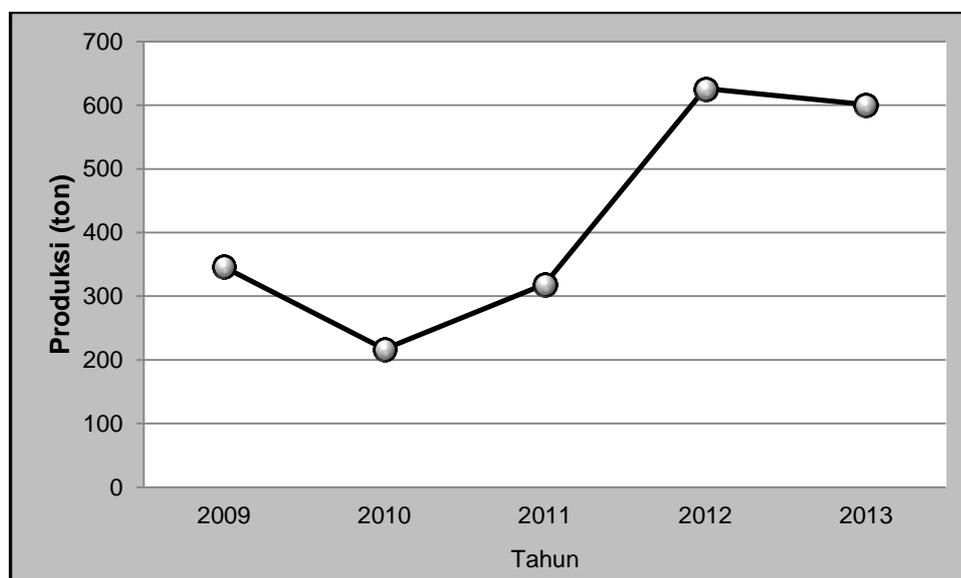
No.	Provinsi	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	728	1.279	1.130	683	1.431
2	Sumatera Utara	1.209	2.539	4.404	4.399	4.418
3	Sumatera Barat	32	12	57	96	310
4	Kepulauan Riau	851	3.200	1.512	1.202	1.940
5	Sumatera Selatan	357	392	-	-	-
6	Bangka Belitung	34	70	35	111	88
7	Bengkulu	-	-	-	-	5
8	Lampung	644	611	837	1.776	593
9	DKI Jakarta	64	11	7	9	83
10	Banten	-	28	19	16	27
11	Jawa Barat	-	234	131	214	267
12	Jawa Tengah	7	11	12	12	68
13	Jawa Timur	346	217	319	626	601
14	B a l i	55	62	136	262	296
15	Nusa Tenggara Barat	177	207	256	279	427
16	Nusa Tenggara Timur	4	3	3	2	2
17	Kalimantan Barat	57	81	3	13	14
18	Kalimantan Selatan	1	7	23	24	23
19	Kalimantan Timur	68	94	114	133	157
20	Sulawesi Utara	212	198	163	91	5.571
21	Gorontalo	3	8	2	3	7
22	Sulawesi Tengah	55	150	88	7	165
23	Sulawesi Barat	7	7	6	8	12
24	Sulawesi Selatan	1	-	7	4	9
25	Sulawesi Tenggara	631	623	647	656	396
26	Maluku	1.815	49	175	255	1.203
27	Maluku Utara	809	172	228	676	720
28	Papua Barat	526	136	266	393	213
INDONESIA		8.693	10.401	10.580	11.950	19.046

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tabel 1.3
Perkembangan Produksi Ikan Kerapu di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Tahun	Produksi (ton)	Perkembangan (%)
2009	346	
2010	217	-37,3
2011	319	47,0
2012	626	96,2
2013	601	-4,0
Rata-rata	421,8	25,5

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.



Gambar 1.2
Perkembangan Produksi Ikan Kerapu di Jawa Timur

Perkembangan produksi ikan kerapu di Jawa Timur selalu naik turun pada tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 produksi ikan kerapu mencapai 346 ton, tetapi berbeda pada tahun 2010 produksi ikan kerapu menurun hingga 37.3% menjadi 217 ton. Tahun berikutnya yaitu tahun 2011 produksi ikan kerapu meningkat kembali sebesar 47% menjadi 319 ton dan terus meningkat hingga mencapai puncak pada tahun 2012 sebesar 96.2% menjadi 626 ton. Hingga

pada tahun 2013 produksi ikan kerapu mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 601 ton (Gambar 1.2).

Salah satu alasan mengapa melakukan kegiatan budidaya kerapu adalah kerapu merupakan komoditas ekspor yang sangat digemari. Permintaan akan ikan kerapu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Permintaan akan komoditas kerapu mencapai 35.000 ton per tahunnya. Jika dibandingkan dengan produksi nasional Indonesia pada tahun 2013 dengan asumsi semuanya diekspor maka produksi kerapu nasional hanya memenuhi sekitar 50% permintaan pasar dunia.

Hampir seluruh komoditas budidaya laut merupakan komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Harganya dipasaran dunia sangat baik dibandingkan dengan ikan air tawar. Begitu pula dengan yang kerapu, harganya dipasaran dunia mencapai US\$ 25 – US\$ 125 dan Indonesia merupakan salah satu eksportir ikan kerapu terbesar di dunia. Pemasaran ikan kerapu Indonesia tersebar di beberapa Negara, yaitu Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei dan Filipina (Ditjen Perikanan Budidaya KKP, 2011).

Menurut Ditjen Perikanan Budidaya KKP (2011), kerapu memiliki banyak jenisnya antara lain kerapu tikus/bebek, kerapu macan, kerapu sunu, kerapu kertang, kerapu lumpur dan lain-lain. Dari sekian banyak kerapu teknologi budidaya kerapu telah dikuasai, baik dari segi pembenihannya maupun pembesarannya dan sekarang telah berkembang ikan kerapu jenis baru, hasil persilangan antara beberapa jenis kerapu. Ikan kerapu hasil persilangan yaitu kerapu Cantang dan kerapu Cantik. Kerapu Cantang adalah kerapu hasil persilangan kerapu macan dan kerapu kertang, sementara kerapu Cantik adalah kerapu hasil persilangan kerapu macan dan kerapu batik. Sentra pembenihan kerapu telah berkembang di beberapa wilayah yang siap mensuplai kebutuhan

akan benih kerapu untuk pembesaran. Sentra pembenihan kerapu di Indonesia terletak di Situbondo – Jawa Timur, Gondol – Bali, Lampung dan Ambon – Maluku. Kebutuhan akan benih kerapu yang selama ini masih mengandalkan benih dari alam, diharapkan dengan adanya sentra pembenihan ikan kerapu dapat memenuhi kebutuhan akan benih kerapu, sehingga proses budidaya ikan kerapu dapat terus berlangsung tanpa terhambat oleh faktor benih yang didapat dari alam.

Produksi ikan kerapu di Provinsi Jawa Timur menurut data yang dihimpun dari Dinas Perikanan dan Kelautan, baik dari budidaya laut maupun tambak periode 2013-2014 mengalami kenaikan. Pada 2013 produksi ikan kerapu mencapai 561.619 kg dan bernilai lebih dari Rp 51 miliar. Pada 2014 mengalami kenaikan menjadi 641.179 kg dengan nilai mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Sementara hingga triwulan kedua 2015, produksi ikan kerapu Jawa Timur sudah mencapai 383.090 kilogram senilai Rp 37 miliar lebih (Kompas, 2015).

Secara nasional, pemerintah kesulitan mencatat data ekspor ikan kerapu karena kewalahan mengawasi pergerakan kapal ekspor. Kapal-kapal ikan tersebut bahkan mengambil langsung ikan kerapu dari sentra budidaya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengatur pengetatan pemasaran ikan kerapu hidup. Kebijakan yang dimaksud adalah mengatur kapal asing pembeli ikan kerapu, hanya diizinkan masuk dan membeli ikan kerapu hidup di titik tertentu. Itupun yang melakukan pembelian ikan kerapu hidup dari karamba adalah kapal Indonesia. Pembeli asing hanya bisa membeli ikan kerapu hidup dari eksportir terdaftar (Kompas, 2015).

Data yang dihimpun dari berbagai sumber, pada 2013 total produksi ikan kerapu nasional mencapai 113.368 ton yang terdiri dari hasil budidaya sebesar

13.464 ton dan hasil tangkapan sebesar 99.904 ton. Badan Pusat Statistik pada 2013 juga mencatat, ekspor kerapu hidup mencapai nilai 19,8 juta dolar AS dengan volume 2.552 ton. Negara tujuan ekspor utama ikan kerapu hidup adalah Hongkong yang mencapai hampir 90 persen dari nilai total ekspor. Ekspor ikan kerapu hidup ke Hongkong selama ini dilakukan melalui dua moda transportasi, yaitu sarana angkutan udara dan kapal laut. Kapal pengangkut ke Hongkong yang selama ini beroperasi di Indonesia 100 persen adalah milik pembeli Hongkong (Kompas, 2016).

Sementara itu, di Jawa Timur yang mempunyai kontribusi dalam produksi ikan kerapu adalah Kabupaten Situbondo. Potensi sumberdaya alam untuk pengembangan usaha ikan kerapu di keramba jarring apung terletak di Kecamatan Bungatan, Panarukan, Klatakan dan Asembagus (BPS Kabupaten Situbondo, 2013).

Setidaknya sudah ada tiga kawasan pesisir pantai di Situbondo yang sudah dimanfaatkan sebagai sentra budidaya ikan kerapu dengan sistem KJA. Selain di kawasan pantai Desa Sumber Waru, Kecamatan Banyuputih, budidaya Ikan kerapu juga dikembangkan di kawasan pantai Desa Kendit Kecamatan Klatakan, Desa Karang Tekok Asembagus, dan Kecamatan Panarukan. Di ketiga kawasan tersebut ombak relatif tenang karena termasuk daerah teluk (BPBAP Kabupaten Situbondo, 2016).

Kajian yang mendalam mengenai usaha budidaya pembesaran ikan kerapu, terutama mengenai apakah usaha budidaya pembesaran ikan kerapu mampu memberikan benefit yang layak apabila ditinjau dari aspek finansial bagi masyarakat perlu dilakukan. Kelayakan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu tergambarkan dari tingkat keuntungan yang diperoleh. Keuntungan diperoleh dari

penerimaan dikurangi seluruh biaya produksi. Semakin tinggi penerimaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh dan sebaliknya. Sementara itu, penerimaan dipengaruhi oleh besarnya produksi dan harga. Semakin tinggi harga atau produksi, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima dengan asumsi harga tetap. Pada sisi lain biaya produksi berpengaruh negatif terhadap tinggi rendahnya keuntungan yang diterima.

Selanjutnya, bagaimana kelayakan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu jika terjadi perubahan variabel output seperti harga jual dan produksi dan perubahan input (biaya produksi) selama usaha budidaya pembesaran ikan kerapu tersebut berlangsung. Di samping itu, perlu juga dikaji apakah ada perbedaan kelayakan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu berdasarkan jenisnya. Hal ini untuk mengetahui jenis ikan mana yang lebih menguntungkan secara finansial.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu dicari solusi untuk dapat memecahkan permasalahan apakah usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo mempunyai prospek yang baik dan layak bagi masyarakat yang mempunyai usaha budidaya pembesaran ikan kerapu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo secara finansial menguntungkan?
2. Apakah ada perbedaan tingkat keuntungan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenisnya?

3. Bagaimana tingkat sensitivitas usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo terhadap perubahan biaya, harga input dan output?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari apakah usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo menguntungkan secara finansial.
2. Untuk mempelajari perbedaan tingkat keuntungan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenisnya.
3. Untuk mengidentifikasi tingkat sensitivitas usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo terhadap perubahan biaya, harga input dan output.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Situbondo tentang kelayakan usaha dalam pengembangan usaha budidaya pembesaran ikan kerapu di Kabupaten Situbondo.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemilik usaha budidaya pembesaran ikan kerapu mengenai kelayakan usaha yang telah dilaksanakan selama ini.
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial ekonomi pertanian dalam kajian perikanan, terutama dalam bidang budidaya pembesaran ikan kerapu.

4. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain dalam penelitian yang sejenis.